

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desai Otonomi Desa*, Bandung, Penerbit PT. Alumni, 2010

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999

Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 1997

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokus Media, Jakarta, 2015

Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Setara Press Malang, 2013

Dina Mariana dan Suci Handayani, *Buku Pintar Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa*, ACCESS, Yogyakarta, 2014

HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993

Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999

Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007

....., *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press Malang, 2015

Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1997

Pattiro, *Anotasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*, Pattiro, Jakarta, 2015

Ridwan. HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2006

Suharsimi arikunta, *Pengelolaan kelas dan siswa*, CV. Rajawali, Jakarta, 1998

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, 1985

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Viktor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998

W. Riawan Tjandra, *Buku Pintar Badan Permusyawaratan Desa Dalam Demokratisasi Desa*, ACCESS, Yogyakarta, 2014

Yusuf Murtiono, *Modul Tata Kelola keuangan Desa*, Infest Yogyakarta, 2016

Yusran Lapananda, *Hukum pengelolaan Keuangan Desa*, PT. Semesta Rakyat Merdeka, Jakarta, 2016

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011



Jurnal, Artikel, Makalah

Ardhiwinda Kusumaputra, *Model Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Struktur Pemerintahan Desa*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015

BPKP, *Petunjuk Pelaksanaan dan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Jakarta, 2015

BPKP, *Warta Pengawasan (Transformasi Pengawasan Nasional)*, Jakarta, 2013

Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997

Jimmy Yansen, *Penerapan Norma Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia “Penerapan Norma Hukum di Lembaga Peradilan”*

Muhammad Hidayanto, *Reposisi Representasi BPD Menuju Pelembagaan Proses Demokratisasi Desa*, Yogyakarta, 2017

Made Nurmawati, *Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Kabupaten Badung Dengan Berlakunya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*, Fakultas Hukum Udayana, 2015

Inisiatif, *Panduan Peran Aktif Warga Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta, 2016

Pattiro, *Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa untuk Penguatan Demokrasi Desa*, Jakarta, 2015

....., *Pedoman Pengawasan Dana Desa*, Pattiro, Jakarta, 2015

Palmira Permata Backhtiar, *Membenahi BPD untuk Memperkuat Desa*, Smeru, Jakarta, 2016

Wafia Silvi Dhesinta, *Analisis Yuridis Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Guna Terwujudnya Pembangunan Desa*, Universitas Gadjah Mada, 2015

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
5. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
7. Permendagri Nomor 2 tahun 2015 tentang Musyawarah Desa
8. Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Musyawarah Desa
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
10. Perda Nagari Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007

Internet

[http://www.keuangedesa.com/2015/05/dasar-hukum-pengawasan-dana-desa-oleh BAMUS/](http://www.keuangedesa.com/2015/05/dasar-hukum-pengawasan-dana-desa-oleh-BAMUS/)

<http://nasional.kompas.com/read/2017/04/06/18554321/icw.sebut.korupsi.di.desa.tem-pati.posisi.ketiga.sepanjang.2016>

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html>

<http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para.html>

